

**Judul** : PERPPU CIPTA KERJA: DPR Akan Nilai Pemenuhan Parameter Kegentingan Memaksa  
**Tanggal** : Rabu, 11 Januari 2023  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 2

## PERPPU CIPTA KERJA

# DPR Akan Nilai Pemenuhan Parameter Kegentingan Memaksa

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat akan menilai terlebih dahulu pemenuhan parameter kegentingan memaksa sebagai dasar terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja sekaligus substansinya. Penilaian dilakukan sebelum memberikan persetujuan atau penolakan atas peraturan tersebut.

Demikian disampaikan dalam pidato pembukaan masa persidangan III DPR tahun sidang 2022-2023 dari Ketua DPR Puan Maharani yang dilucakan Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel. Hadir pula pimpinan DPR lain, yaitu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Lodewijk Paulus, dan Muhammad Iskandar.

Dalam pidato disampaikan pula sejumlah agenda penting dan strategis yang menanti untuk diselesaikan DPR pada masa persidangan kali ini, salah satunya Perppu Cipta Kerja. Pembahasan itu menindakan-

juti penerbitan Perppu Cipta Kerja oleh pemerintah pada 30 Desember 2022.

Pemerintah menilai, Perppu Cipta Kerja merupakan tindak lanjut pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang mengamandatkan agar dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Mengacu pada ketentuan perundang-undangan, Perppu Cipta Kerja harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikutnya. Jika tidak mendapat persetujuan, Perppu harus dicabut.

"DPR sesuai dengan fungsi konstitusionalnya akan menilai pemenuhan parameter sebagai kegentingan memaksa yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan perppu," kata Rachmat Gobel.

Selain itu, kata Rachmat, DPR juga akan menilai sub-



Rachmat Gobel

stansi yang memberi landasan hukum pemerintah dan lembaga terkait untuk mengambil kebijakan dan langkah-langkah berbagai aspek pengaturan terkait Perppu.

Dalam pidato disampaikan, DPR bersama pemerintah akan melanjutkan pembahasan 11 RUU yang masih dibahas dan RUU lainnya yang masuk Prolegnas Prioritas 2023.

Seusai rapat paripurna, Sufmi

Dasco Ahmad mengatakan, dokumen Perppu Cipta Kerja diserahkan pemerintah ke DPR saat DPR tengah reses. Oleh karena itu, DPR baru memprosesnya pada masa persidangan saat ini.

Terkait waktu pembahasan, DPR akan lebih dahulu menggelar rapat pimpinan dan Badan Musyawarah (Bamus). Selanjutnya, Bamus akan menunjuk alat kelengkapan DPR yang mengkaji Perppu Cipta Kerja. "Untuk pembahasan Perppu, kami akan sesuaikan mekanisme di UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," kata Dasco.

Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perppu yang diterbitkan pemerintah harus dibahas DPR.

### Dua fraksi menolak

Dari total sembilan fraksi di

DPR, dua fraksi menyatakan akan menolak memberikan persetujuan Perppu Cipta Kerja. Kedua fraksi tersebut adalah Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera.

Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Herman Khaerun mengatakan, partainya menolak Perppu Cipta Kerja karena tak memenuhi asas partisipatoris dan tak memperbaiki pasal-pasal yang menjadi sorotan publik. Ia meragukan urgensi terbitnya Perppu.

Adapun Sekretaris Fraksi PKS Ledia Hamfa Amaliah menilai langkah Presiden menerbitkan Perppu Cipta Kerja menunjukkan betapa pemerintah mengganggalkan pelanggaran terhadap hierarki perundang-undangan sekaligus melecehkan DPR. Padahal, sebagaimana putusan MK, pemerintah masih punya waktu satu tahun untuk memperbaiki UU Cipta Kerja.

(206)